

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan mendukung dalam menjalankan suatu organisasi baik organisasi swasta maupun publik. Pada organisasi publik sendiri terutama pada sektor pemerintah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan menjalankan tugas yang di berikan terutama dalam hal mengelola keuangan daerah karena pemerintah di berikan kepercayaan oleh rakyat dalam hal mengelola keuangan daerah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik terutama dalam hal pentausahaan keuangan daerah setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan sering mengikuti pelatihan. Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan mampu memahami dan menerapkan logika akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno 2008).

Pada kabupaten Bone Bolango sendiri terutama di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah memiliki jumlah pegawai yang masih terlalu minim terutama yang berlatar belakang pendidikan

Akuntansi. Berikut di sajikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel.1 Daftar Pegawai DPPKAD Bone Bolango

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
Akuntansi	25
Non-Akuntansi	48
Total	73

Sumber : DPPKAD Bone Bolango

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi masih terlalu sedikit di bandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan non-Akuntansi. Hal ini juga dapat di lihat dari masih minimnya pejabat dan staf di lingkungan DPPKAD yang mendapatkan pelatihan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerja di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta tidak terdapatnya analisis dalam hal berhubungan dengan pengiriman pelatihan. (Sumber : DPPKAD). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Hutapea dan Thoha (2008:4), definisi kompetensi yang di adopsi dari Boyatzis (1982) Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”.

Ada tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi yaitu : Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap. (Hutapea dan Thoha) (2008:28). Jadi Sumber daya manusia yang berkompeten juga harus

memiliki pengetahuan mengenai bidang akuntansi, memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem akuntansi dan serta di dukung dengan sikap yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di berikan hal ini tentu akan mampu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintahan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasn keuangan daerah. Sedangkan penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Bone Bolango dalam hal ini yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah mengalami beberapa masalah di antaranya masalah pengelolaan dan pertanggung jawaban kas yang ada pada bendahara umum pengeluaran belum memadai di karenakan masih kurangnya dokumen atau bukti pendukung dalam hal yang berhubungan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) (Sumber : DPPKAD Bone Boalngo). Masalah ini masih harus lebih diperhatikan karena pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal penatausahaan akan sangat berdampak pada kekeliruan laporan keuangan pemerintah daerah. Mardiasmo (2002: 25) mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instansi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan yang baik pula.

Komponen laporan keuangan pemerintah sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca; Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa laporan keuangan sekaligus memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 ada lima jenis pendapat akuntan yaitu : Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat.

Opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango sendiri semenjak Bone Bolango berdiri sampai pada Tahun 2012 tidak pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. (Wahyudin. 2013. Pemkab Masih raih opini WDP/ [Http://m.antaragorontalo.com/berita/1443/pemkab-bone-bolango](http://m.antaragorontalo.com/berita/1443/pemkab-bone-bolango)). Pada Tahun 2013 dan 2014 Bone Bolango berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Meskipun Bone Bolango sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2014 masih ada sedikit temuan yang perlu ditindak lanjuti dan dilaporkan, temuan tersebut berupa:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai; (Kurangny dokumen atau bukti pendukung dalam hal yang berhubungan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Aset Tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal;
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib. (Saputera, Adi. 2015. Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan atas LPKD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014/[Http://gorontaloprov.go.id/prov-gtlo](http://gorontaloprov.go.id/prov-gtlo)).

Dengan melihat permasalahan-permasalahan di atas dapat di buktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penatausahaan keuangan daerah merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan-temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dalam hal ini penatausahaan Kabupaten Bone Bolango masih memiliki kendala dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban kas yang ada pada bendahara pengeluaran.

Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan mampu menjalankan penatausahaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah ini yang nantinya akan dipertanggung jawabkan dan di sampaikan kepada para wakil rakyat atau DPRD.

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Sebelumnya pernah di teliti oleh Luh Kadek Sri Megawati dkk membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun pada penelitian peneliti hanya menggunakan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai variable independen sehingga membedakan dengan penelitian sebelumnya, tempat penelitiannya juga dilakukan ditempat yang berbeda pada penelitian Ni Luh Gede dan kawan-kawan dilakukan pada Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penatausahaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Berpengaruh Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah?
4. Apakah Penatausahaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui apakah Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan saran dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang kompetensi sumber daya manusia dan penatausahaan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik dengan sesuai teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan.